Resi Gudang Tidak Optimal

Tanggal	: Kamis , 18 Maret 2021
Media	: Kompas
Halaman	: 15
Wartawan	: LKT
Muatan Berita	: Netral
Narasumber	: Miftahul Huda *(Direktur Jasa Kelautan KKP)*, Safri Burhanuddin *(Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Marves)*, Cucu Sutara *(Ketua Kadin Provinsi Jabar)*
Rubrik	: Umum
Topik	: Sistem Resi Gudang

Resi Gudang Tidak Optimal

Perbankan dinilai enggan menerbitkan resi karena ketidakpastian harga garam. Akibatnya, sistem resi gudang yang diharapkan membantu petambak garam tidak dapat berjalan optimal.

JAKARTA, KOMPAS — Anjloknya harga dan serapan garam rakyat turut berimbas pada tersendatnya sistem resi gudang garam yang digulirkan pemerintah. Padahal, resi gudang menjadi penyangga bagi petambak untuk mendapatkan harga layak.

Hingga kini, stok garam rakyat mencapai 723.000 ton. Indonesia memiliki 24 gudang untuk penyimpanan garam rakyat. Namun, baru tujuh di antaranya yang memiliki sistem resi gudang, yakni di Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Tuban, Pamekasan, dan Pangkep.

Menurut Direktur Jasa Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Miftahul Huda, sistem resi gudang tersendat karena perbankan tidak mau menerbitkan resi. Harga garam yang terus anjlok tidak memberikan kepastian dan jaminan bagi perbankan. "Bank sulit menentukan taksiran nilai garam yang jadi agunan," kata Huda, Rabu (17/3/2021).

Resi gudang adalah surat atau dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang dikelola oleh pengelola yang mendapat izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti). Sistem resi gudang diharapkan meningkatkan pendapatan petani/petambak karena mereka bisa menjual hasil panen ketika harganya tinggi.

Selain itu, gudang garam nasional juga belum optimal menyerap garam rakyat yang menumpuk. Hal ini, antara lain, karena beban ongkos angkut garam ke gudang wajib ditanggung petambak, sedangkan harga jual garam hanya Rp 400 per kg. "Beberapa gudang garam juga sudah penuh terisi karena tidak ada permintaan dari industri," kata Huda.

Kementerian Kelautan dan Perikanan akan fokus pada peningkatan kualitas dan nilai tambah garam rakyat, seperti pendampingan riset dan teknologi agar kualitas garam memenuhi kebutuhan industri. Selain itu, saluran digital juga dimanfaatkan untuk menjual garam rakyat dalam kemasan.

Impor naik

Ketika ratusan ribu ton garam rakyat belum terserap dan terancam rusak di tempat penyimpanan, impor garam justru terus naik. Tahun ini, impor garam diperkirakan mencapai 3,07 juta ton, naik dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 2,7 juta ton, seiring naiknya kebutuhan garam untuk industri.

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Safri Burhanuddin, impor garam tahun ini lebih banyak karena kebutuhan tahun berjalan dan kebutuhan stok tahun depan guna menjaga kestabilan stok garam industri.

Investasi industri pengguna garam cenderung meningkat setiap tahun. Keterbatasan produksi dan kapasitas lahan garam nasional mendorong perlunya impor garam sebagai penyangga. Menurut Safri, lima tahun lalu pemerintah berpatokan Indonesia sudah mengarah ke swasembada garam industri. Ketika itu, kebutuhan garam industri sekitar 2 juta ton per tahun, tetapi kini sudah naik jadi 3 juta ton per tahun.

Terkait penyerapan garam rakyat, Sekretaris Umum Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia Cucu Sutara mengatakan, pelaku industri tetap berkomitmen menyerap garam produksi petambak rakyat. "Beri tahu kami informasi dan data lokasi, jumlah produksi, dan kualitas garam dalam negeri yang bisa diserap," katanya.

Salah satu indikator mutu garam yang ditinjau pelaku industri adalah kandungan natrium klorida (NaCl). Menurut Cucu, kandungan NaCl pada mayoritas garam rakyat di bawah 90 persen. Dampaknya, pelaku industri memanfaatkan garam rakyat untuk pengalengan, pengasinan, penyamakan kulit, dan konsumsi langsung.

Di sisi lain, mayoritas industri membutuhkan garam dengan kandungan NaCl minimal 97,5 persen. Industri yang membutuhkan garam dengan kualitas itu antara lain *chlor alkali plant* (CAP), farmasi dan kosmetik, serta produk bumbu olahan (*seasoning*). (LKT/JUD)